

Kompetisi Esai Penganggaran Hijau
Inovasi Pendanaan dan Penganggaran Program Pemerintah Daerah Rendah Karbon
(Financing and Budgeting Innovation for Low Carbon Activities on Sub-National Level)

Sebagai negara yang ikut berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Perpres no.61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Di bawah koordinasi Sekretariat Rencana Aksi Nasional – Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) Bappenas, usaha ini diturunkan sebagai usaha bersama antara pemerintah pusat (RAN-GRK) dan pemerintah daerah (RAD-GRK) untuk mengurangi emis karbon atas berbagai aktivitas dalam lima bidang kegiatan (pertanian, kehutanan dan lahan, energi dan transportasi, industri, dan pengelolaan limbah).

Kenyataan bahwa peningkatan konsumsi per kapita di Indonesia masih berhubungan dengan emisi per kapita CO₂ memberikan tantangan bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Dalam struktur perekonomian, proses produksi, serta pola eksplotasi sumber daya alam saat ini, pilihan untuk menahan bahkan menurunkan emisi per kapita CO₂ di Indonesia memiliki biaya yang sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan masih lambatnya berbagai program pengurangan emisi karbon yang dilakukan pemerintah, baik dari peningkatan sumber energi terbarukan, menahan laju deforestasi, serta pengelolaan limbah masyarakat dan industri.

Pemerintah daerah merupakan ujung tombak pengurangan emisi karbon di level daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki komitmen besar melalui aktivitas-aktivitas pengurangan emisi, di tengah keterbatasan dana alokasi dari pemerintah pusat maupun pendapatan asli daerah. Oleh karenanya, dibutuhkan sumber-sumber pendanaan baru dan serta inovasi penganggaran yang dapat membantu dalam menjalankan berbagai aktivitas pengurangan emisi karbon di level daerah, baik untuk bidang pertanian, kehutanan dan lahan, energi dan transportasi, industri, maupun pengelolaan limbah)

Sebagai salah satu pihak yang membantu pemerintah daerah dalam mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan ke dalam perencanaan dan penganggaran. LPEM FEB UI memberikan kesempatan bagi apratur sipil pemerintah daerah untuk memberikan sebuah contoh **inovasi pendanaan yang dapat membantu pemerintah daerah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan bagi pemerintah daerah**. Solusi dapat berupa namun tidak terbatas pada program, peraturan, perubahan sistem, proyek, maupun kerjasama dengan komunitas atau badan usaha swasta.

Terdapat empat topik yang dapat dieksplorasi, meliputi;

1. Instrumen Pendanaan Baru untuk Program Pengurangan Emisi Karbon

Menawarkan solusi pendanaan baru bagi pemerintah daerah yang melibatkan satu atau lebih stakeholder, di luar pemerintah daerah, untuk mendukung program pengurangan emisi karbon, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

2. Inovasi Program Pengurangan Emisi Karbon Berbasis Kemandirian Masyarakat

Dengan terbatasnya pendanaan yang dimiliki pemerintah daerah, peran masyarakat dalam pengurangan emisi karbon menjadi esensial di masa yang akan datang. Sub-topik ini bertujuan untuk mencari inovasi program pengurangan emisi karbon dengan meminimalisasi penggunaan anggaran pemerintah daerah, serta memaksimalkan kontribusi masyarakat umum dan komunitas dalam pelaksanaannya.

3. Kebijakan Penganggaran Hijau dalam Mendorong Pengurangan Emisi Karbon

Menawarkan solusi implementasi kebijakan penganggaran program-program pemerintah daerah yang memperhatikan aspek lingkungan, baik melalui kebijakan baru maupun perubahan sistem dalam penganggaran pemerintah daerah.

4. Perempuan dan Penganggaran Hijau

Menawarkan solusi kebijakan penganggaran program pemerintah daerah, yang memperhatikan aspek lingkungan, dengan mendorong partisipasi perempuan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Hadiah Kompetisi Esai

Juara 1 : Rp 5.000.000* + Voucher Training eCBA oleh LPEM FEB UI

Juara 2 : Rp 4.000.000* + Voucher Training eCBA oleh LPEM FEB UI

Juara 3 : Rp 3.000.000* + Voucher Training eCBA oleh LPEM FEB UI

**) Pajak hadiah ditanggung penyelenggara*

Persyaratan Peserta:

1. Warga Negara Indonesia
2. Merupakan pegawai pemerintah daerah, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun non-PNS, dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari atasan (scan).
3. Berusia di atas 21 tahun pada tanggal pengumpulan esai (dibuktikan dengan melampirkan hasil pindai/scan KTP/SIM/Paspor)

Persyaratan Esai:

1. Esai ditulis dalam bahasa Indonesia yang baku dan tidak perlu menyertakan abstrak
2. Panjang esai yang diharapkan adalah 2000-3000 kata (di luar lampiran, dan daftar pustaka)
3. Sitasi untuk referensi yang digunakan dalam esai mengikuti format APA 6th Edition (dapat dibuat dengan bantuan fungsi "Insert Citation" pada Microsoft Word 2007, 2010, 2013, dan 2016, atau menggunakan situs seperti <http://www.citethisforme.com/> dan <http://www.citationmachine.net>)
4. Esai ditulis dengan format halaman dan font:
 - a. Halaman A4
 - b. Font: Times New Roman, ukuran 12
 - c. Spasi 1,5
 - d. Margin kiri dan kanan sebesar 2 cm, margin atas dan bawah sebesar 3 cm
5. Esai dikirimkan dalam format **Microsoft Document (.docx) dan PDF (.pdf)**, dengan format penamaan "Esai_Judul_Lengkap". Sebagai contoh, apabila judul esai adalah "Lorem Ipsum Dolor Sit Amet", maka penamaan file.docx dan .pdf adalah Esai_Lorem_Ipsum_Dolor_Sit_Amet
6. **Tidak boleh terdapat nama pengirim esai dalam judul file atau di dalam esai.** Esai diidentifikasi dengan hasil scan KTP/SIM/Paspor yang dilampirkan bersama dengan esai.
7. Format untuk e-mail subject pada saat mengirim esai adalah "**Esai Penganggaran Hijau <Nama Lengkap>**". Sebagai contoh, apabila nama pengirim esai adalah Arif Budiman, maka e-mail subject-nya adalah Esai Penganggaran Hijau Arif Budiman

Esai dikirimkan ke e-mail penganggaranhijau@lpem-feui.org maksimal tanggal 28 September 2018, pukul 23:59:59.